

**Partisipasi Masyarakat dalam Program BspS Melalui Upaya
Keswadayaan Demi Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa
Pucangombo**

Dian Nur Aini¹Syamsul Huda²Anisa Fitria³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
20011010040@student.upnjatim.ac.id , syamsul.huda.ep@upnjatim.ac.id ,
anisa.fitria.ep.@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to determine community participation in the BSPS program through self-help efforts to create livable houses in Pucangombo Village. The research in this journal article applies a qualitative descriptive method because it is considered that it is easy to find information that can be accessed starting from time constraints, as well as the place to conduct research. Population growth tends to increase every year, conditions like this will result in various problems such as increasing housing needs, poverty rates, and slum areas. The Directorate General of the Ministry of Public Works and Public Housing as the organizer of government affairs issued a breakthrough program in the form of Self-Help Housing Stimulant Assistance which aims to improve decent housing that is healthy, safe, harmonious, orderly and sustainable for people with low incomes supported also by community participation through self-help forms. In this activity, community participation is categorized as enthusiastic, which can be seen from the optimal source of funds by looking at the form of self-help they have. So that the gains from the BSPS program are reducing inadequate housing and increasing the quality of community housing.

Keywords: *BSPS, Livable Houses, Nongovernmental*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam program BSPS melalui upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni di Desa Pucangombo. Penelitian dalam artikel jurnal ini menerapkan metode deskriptif kualitatif karena dianggap adanya kemudahan mencari informasi yang bisa diakses mulai dari keterbatasan waktu, dan juga tempat melakukan penelitian. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya condong mengalami penambahan, keadaan seperti ini akan mengakibatkan beragam permasalahan seperti meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, angka kemiskinan, dan kawasan kumuh. Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penyelenggara urusan pemerintahan mengeluarkan program terobosan berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang bertujuan meningkatkan hunian yang layak yang sehat, aman, serasi, teratur, serta berkelanjutan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ditopang juga dengan partisipasi masyarakat melalui bentuk keswadayaan. Dalam kegiatan ini partisipasi masyarakat terkategori antusias dapat dilihat dari sumber dana yang optimal dengan melihat bentuk swadaya yang mereka punya dinilai cukup besar sehingga proses

pembangunan rumah bagi penerima bantuan dapat berjalan mulus mungkin hanya ada hambatan – hambatan kecil akan tetapi masih bisa dikendalikan. Sehingga perolehan dari program BPS yaitu berkurangnya hunian yang tidak layak dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Kata kunci: BPS, Rumah Layak Huni, Swadaya Masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan utama manusia terdiri dari sandang, pangan, serta papan. Sandang merupakan suatu keperluan berupa pakaian, pangan merupakan suatu kebutuhan berupa makanan dan minuman, terakhir papan berupa tempat tinggal. Selain itu, ada kebutuhan yang tidak kalah penting yakni kebutuhan air bersih dan akses sanitasi. Dengan memenuhi lima kebutuhan tadi manusia bisa mempertahankan hidupnya, terjamin kesejahteraannya, mampu merasa aman dan nyaman sehingga pemerintah harus memastikan masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya supaya memiliki hidup yang berkualitas (Hermawan & Sulastri, 2023).

Berlandaskan data dari BPS, Total populasi Pertengahan Tahun 2022 di Indonesia sebanyak 275 773,8 (Ribu Jiwa); Tahun 2021 sebanyak 272 682,5 (Ribu Jiwa), Tahun 2020 sebanyak 270 203,9 (Ribu Jiwa). Sehingga dapat diketahui bahwa semakin bertambahnya tahun populasi manusia pasti bertambah di samping itu tentunya kebutuhan manusia juga bertambah apalagi pakaian yang selalu dipakai setiap hari; makan dan minum untuk kebutuhan nutrisi tubuh; yang tak kalah penting juga hunian karena tanpa memiliki hunian tidak bisa melindungi diri dari ancaman bencana; kebutuhan air bersih untuk menunjang kegiatan mencuci pakaian, mandi, minum, memasak; dan perlunya akses sanitasi guna pencegahan penyakit diare.

Kemiskinan dimaknai dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ini terjadi pada negara yang berkembang maupun negara maju. Kemiskinan tidak hanya tentang keadaan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari – hari melainkan bisa dilihat dari segi hunian, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, tak ada jaminan masa depan (Qomaria, 2015). Pertumbuhan penduduk (*population growth*) setiap tahunnya condong mengalami penambahan, keadaan seperti ini akan mengakibatkan beragam permasalahan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tingkat angka kemiskinan berdasarkan data terbaru menurut Badan Pusat Statistik tercatat September Tahun 2022 memperoleh 26,36 juta orang. Dari segi tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi sepenuhnya hal ini diperkuat juga dengan data dari BBPS terkait

persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap hunian yang layak dan tercapai di Indonesia adalah 60,66% per tahun 2022 yang artinya masih ada 39,34 persen yang masih memiliki hunian tidak layak. Pada dasarnya setiap warga masyarakat pasti menginginkan perumahan yang layak huni, akan tetapi pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih saja menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat merupakan kementerian yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum & perumahan rakyat. Pemerintah Republik Indonesia melalui perantara kementerian ini mengeluarkan program yang bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bisa BSPS. Program ini diserahkan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengoptimalkan rumah layak huni (RLH). BSPS merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang ditopang oleh swadaya masyarakat. kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya RLH oleh masyarakat berpenghasilan rendah ditopang dengan PSU sehingga terlaksananya perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, serta berkelanjutan (Priatama, 2020). Tahap pendampingan penerima rumah bantuan guna pembangunan dan peningkatan mutu hunian oleh SKPD kab / kota adalah prosedur yang sangatlah fundamental dalam menyokong keterlibatan masyarakat buat mencapai kesuksesan kebijakan pemerintah (Kartius & Oktaviani Bullu, 2021).

Adapun Jenis BSPS antara lain :

- Pembangunan Baru (PB) merupakan kegiatan membangun hunian baru yang layak serta disokong dengan bentuk dana atau bahan bangunan untuk menstimulasi aktivitas Pembangunan Baru yang dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.
- Peningkatan Kualitas (PK) merupakan kegiatan membenahi bagian rumah guna mengoptimalkan kualitas rumah dan memenuhi ketentuan rumah layak huni serta disokong dengan bentuk dana atau bahan bangunan untuk menstimulasi aktivitas Peningkatan Kualitas yang dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.

Untuk kualifikasi yang wajib dipenuhi guna memperoleh program BSPS sebagai berikut :

- WNI sudah berkeluarga;
- Mempunyai / menguasai tanah dengan tanda bukti kepemilikan yang jelas juga sah;
- Memiliki pendapatan keluarga dengan batas paling tinggi sebanyak setengah kali UMP;
- Belum mempunyai hunian / sudah mempunyai rumah dan mendiami rumah satu - satunya namun dengan keadaan tidak layak;
- Tidak pernah memperoleh BSPS dengan batas waktu 10 tahun;

- Bersedia mengikuti ketentuan – ketentuan di program BSPS.

Untuk besaran bantuan, berasal dari APBN. Nilai sumbangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perumahan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Adapun, tahapan penyelenggaraan BSPS terdiri atas 5 tahap yakni :

- 1) Tahap persiapan kegiatan, meliputi :
 - Pemrograman, terdiri dari perencanaan program dan penganggaran.
 - Penetapan Lokasi Kegiatan, terdiri dari pengusulan kegiatan, verifikasi / penilaian usulan, penetapan lokasi, seleksi / pengolahan validasi data, dan penyampaian daftar calon penerima bantuan.
- 2) Tahap perencanaan kegiatan, meliputi :
 - Penyiapan Kegiatan, terdiri dari penugasan tim pelaksana, penunjukan bank/pos, pembekalan dan mobilisasi tim pelaksana, penyiapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bahan bangunan, verifikasi data calon penerima bantuan, & penetapan lokasi desa / kelurahan dan calon penerima bantuan.
 - Penyiapan Masyarakat, terdiri dari pengorganisasian calon penerima bantuan, sosialisasi dan penyuluhan, identifikasi kebutuhan perbaikan rumah, survei pemilihan toko / penyedia bahan bangunan, penyusunan proposal, pengusulan proposal, & verifikasi dan persetujuan proposal.
- 3) Tahap pelaksanaan kegiatan, meliputi :
 - Penetapan Penerima, Pencairan, dan Penyaluran Bantuan, terdiri dari penetapan penerima bantuan, pencairan dana bantuan, dan penyaluran dana bantuan.
 - Penggunaan Bantuan, terdiri dari penyusunan DRPB, kontrak toko / penyedia bahan bangunan, dan pembelian bahan bangunan.
 - Pekerjaan Fisik Rumah, terdiri dari penunjukan tukang / pekerja, dan pekerjaan perbaikan / pembangunan rumah.
 - Pertanggungjawaban Bantuan, terdiri dari pembayaran upah kerja, dan penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
 - Pekerjaan Fisik Pembangunan PSU, terdiri dari pengadaan, pekerjaan fisik pembangunan PSU, pertanggungjawaban bantuan, dan penyerahan bantuan.
- 4) Tahap pengawasan dan pengendalian, meliputi :
 - Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian
 - Pelaporan, terdiri dari alur pelaporan, dan jenis laporan.
- 5) Tahap pemanfaatan meliputi :
 - Penghunian dan Pemeliharaan
 - Pembinaan

Salah satu elemen dari program BSPS ialah swadaya masyarakat. makna dari swadaya masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai kekuatan sendiri atau upaya

sendiri. Jadi, swadaya masyarakat merupakan kekuatan yang berasal dari masyarakat dalam berkegiatan dengan lebih mengutamakan kesanggupan dari diri masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini mengambil kata partisipasi masyarakat karena masyarakat berpenghasilan rendah merupakan subjek dari program BSPS sedangkan untuk objeknya ialah rumah layak huni. Selain itu, bentuk swadaya masyarakat sangat diperlukan mengingat dana yang diserahkan pemerintah belum pepak guna peningkatan kualitas rumah swadaya. Kata partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang dalam keadaan sadar dalam berinteraksi sosial di situasi tertentu. Bisa juga diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam menangani permasalahan atau persoalan dan ikut andil dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi Bornby, partisipasi ialah perilaku guna “mengambil bagian” baik dari segi tindakan atau ungkapan untuk menggali komponen dari aktivitas yang bertujuan mendapat faedah (Julianto, 2020).

Rumah merupakan gedung memiliki fungsi sebagai hunian yang layak, sarana pembinaan keluarga, gambaran harkat serta martabat, aset bagi pemilikinya. Pengertian dari perumahan yaitu sekumpulan rumah sebagai komponen dari kawasan tinggal, daerah kota ataupun desa, dilengkapi PSU sebagai output usaha pemenuhan RLH. Adapun makna dari rumah swadaya yakni rumah yang didirikan atas inisiatif serta usaha masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program BSPS melalui upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni di Ds. Pucangombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan?
2. Bagaimana dampak dari program BSPS bagi kesejahteraan masyarakat atau lebih tepatnya penerima bantuan?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program BSPS melalui upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni di Ds. Pucangombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan
2. Mengetahui dampak yang terjadi dari program BSPS bagi kesejahteraan masyarakat atau lebih tepatnya penerima bantuan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada artikel ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Alasan menerapkan metode ini dikarenakan dianggap tepat untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan hal yang ingin diteliti yakni partisipasi masyarakat dalam program BSPS melalui upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni di desa pucangombo. Penelitian deskriptif merupakan sebuah teknik penelitian

yang mungkin peneliti mendapatkan penafsiran seluas mungkin akan subjek yang akan dipelajari ketika melakukan penelitian. Sedangkan, Penelitian kualitatif diterapkan sebagai teknik pengkajian yang mendatangkan data deskriptif mengenai perilaku, sebagai data deskriptif yang bisa dipandang, ditelaah, dan dijawab secara bersama - sama berlandaskan dimensi yang disediakan peneliti (Sjafari, 2023).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kab. Pacitan, lebih tepatnya pada Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo. Alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi ini karena desa tersebut termasuk daerah yang mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya serta memiliki jalan yang cukup ekstrem sehingga cocok dengan melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program BSPS melalui upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni di desa pucangombo.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Kali ini, peneliti memakai dua macam data yakni data primer (*data first hand*) yang berasal hasil wawancara secara langsung dengan penerima bantuan. Sedangkan untuk data sekunder (*data second hand*) peneliti memperoleh data yang berasal dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengaplikasikan tiga cara pengumpulan data antara lain :

- **Observasi**

Observasi merupakan sistematis yang dipakai mengamati kejadian kegiatan manusia & kontrol fisik dimana kejadian itu berjalan secara konsisten mulai dari kegiatan guna memanifestasikan sebuah bukti. Metode riset yang diaplikasikan pada setiap kegiatan penelitian bervariasi, keperluan, dan tujuan penelitian (Hasanah, 2017).

- **Wawancara**

Wawancara merupakan proses hubungan komunikasi yang dilakukan oleh minimal dua orang didasari dengan ketersediaan dalam suasana alami, dengan percakapan tertuju pada yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan atau keyakinan sebagai basis utama dalam proses pemahaman (Wekke Suardi, 2019).

- **Dokumentasi**

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi kegiatan seperti proses wawancara , pada saat kegiatan berlangsung, dan sebagainya.

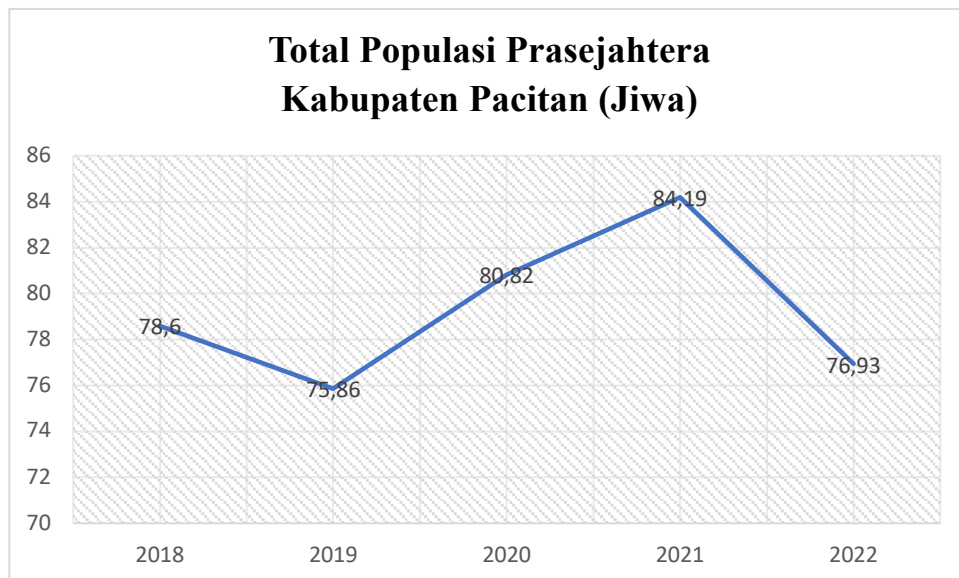
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur letaknya di bagian selatan barat daya dengan luas daerah 1.389,87 Km². Secara kawasan administrasi terdiri atas dua belas kecamatan, lima kelurahan dan seratus enam puluh enam desa. Batas - batas administrasi :

Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri
Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020, total populasi kab. pacitan tahun 2021 tercatat sekitar 589,1 ribu jiwa. Berikut grafik jumlah penduduk miskin kabupaten pacitan :

Grafik 1. Total populasi prasejahtera Kabupaten Pacitan periode 2018 - 2022



(Sumber: Data BPS)

Berdasarkan grafik di atas peneliti mengetahui bahwa total populasi prasejahtera di kab. pacitan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mendapati fluktuasi. Kemerosotan pertama terjadi tahun 2018 sebanyak 78,6 ribu jiwa menjadi 75,86 ribu jiwa tahun 2019. Untuk penurunan kedua terjadi pada tahun 2021 sebanyak 84,19 ribu jiwa menjadi 76,93 ribu jiwa di tahun 2022. Selama lima tahun ke belakang, total populasi miskin tertinggi terjadi di tahun 2021 kira-kira 84,19 ribu jiwa sementara untuk keseluruhan populasi prasejahtera terendah di tahun 2019 sebanyak 75,86 ribu jiwa.

Tahun 2023 tepatnya bulan Februari sampai dengan Juni kabupaten pacitan mendapatkan kuota penerima bantuan program BSPS dengan jenis kegiatan Pembangunan Baru sebanyak 891 kepala keluarga atau penerima bantuan (PKE + Reguler). Upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni yakni dengan

cara berpartisipasi dalam program BSPS. Rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni jika memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) **Ketahanan bangunan**, baik dari segi komponen struktur dan non struktur yang memenuhi kaidah konstruksi dan menggunakan bahan bangunan yang ber-SNI (Standar Nasional Indonesia).
- 2) **Luas Bangunan / Kecukupan Luas**, seperti luas lantai per kapita per orang berukuran 7,2 m².
- 3) **Akses Sanitasi**, akses yang harus tersedia di setiap rumah, untuk kloset dengan leher angsa, dan tersambung ke SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) / septic tank yang harus disedot minimal 5 tahun sekali.
- 4) **Akses Air Minum**, dengan ciri tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna; tersedia minimal 12 jam sehari; memiliki jarak jangkauan maksimal 30 menit; dan tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat.

Bahkan program BSPS ini diperkuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 terkait Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Bentuk bantuan berupa uang senilai 20 Juta Rupiah dimana 17,5 Juta Rupiah diperuntukan guna membeli bahan bangunan dan 2,5 Juta Rupiah diperuntukan guna membayar upah kerja. Berikut rinciannya :

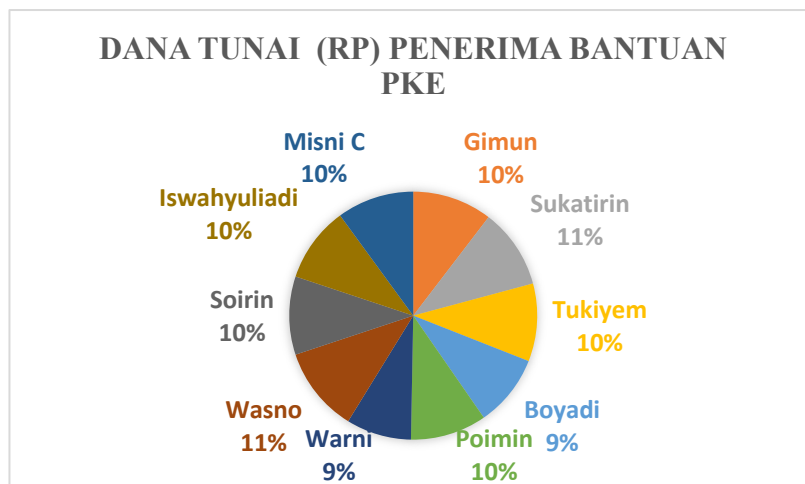
- Pembelian bahan bangunan :
 - Tahap I : Rp 8.750.000
 - Tahap II : Rp 8.750.000
- Pembayaran Upah Kerja (Tukang) :
 - Tahap I : Rp 1.250.000
 - Tahap II : Rp 1.250.000

Desa pucangombo merupakan desa yang ada di Kec. Tegalombo Kab. Pacitan yang berkesempatan memperoleh BSPS sebanyak 39 kepala keluarga atau penerima bantuan pada tahun 2023 dengan rincian 19 penerima bantuan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem) dan 20 penerima bantuan reguler. Dalam proses pembangunan rumah penerima bantuan perlu didukung oleh swadaya masyarakat sendiri supaya dapat berjalan lancar. Berikut data penerima bantuan:

Tabel 1. Nama Penerima Bantuan PKE Desa Pucangombo beserta Sumber Swadaya

| No. | Nama Penerima Bantuan | Sumber Dana Bahan | | Pekerjaan | Jumlah Penghasilan (Rp) |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | | Dana Tunai (Rp) | Pakai Bahan Lama (Rp) | | |
| 1 | Gimun | 29.992.636 | | Petani | 600.000 |
| 2 | Sukatirin | 30.072.636 | | Petani | 650.000 |
| 3 | Tukiyem | 29.296.652 | | Petani | 500.000 |
| 4 | Boyadi | 27.070.336 | | Petani | 650.000 |
| 5 | Poimin | 28.651.652 | | Petani | 650.000 |
| 6 | Warni | 24.502.933 | | Petani | 700.000 |
| 7 | Wasno | 32.071.739 | 195.000 | Petani | 600.000 |
| 8 | Soirin | 29.434.136 | | Petani | 700.000 |
| 9 | Iswahyuliadi | 28.422.225 | | Petani | 850.000 |
| 10 | Misni C | 28.953.933 | | Petani | 600.000 |

Grafik 2. Dana Tunai (Rp) Penerima Bantuan PKE

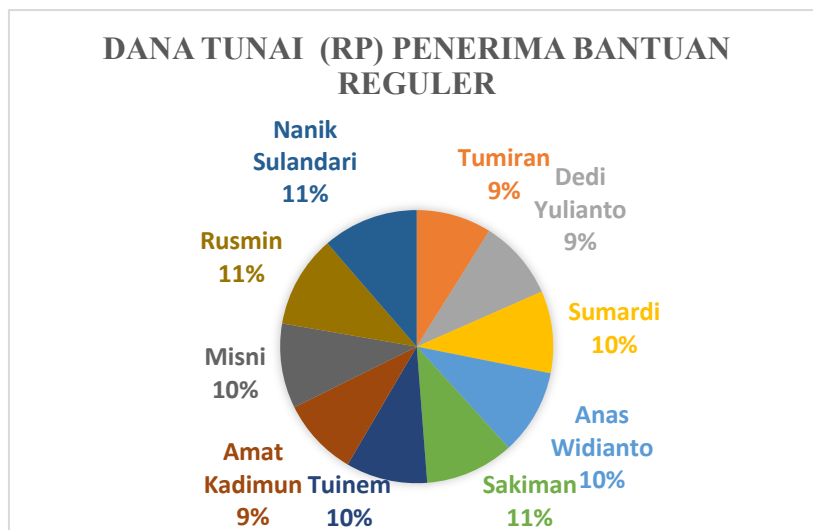


Berlandaskan tabel di atas, bahwa nama penerima bantuan PKE bentuk swadaya tertinggi atas nama Bapak Wasno senilai Rp 32.071.739 sedangkan bentuk swadaya terendah atas nama Bapak Warni senilai Rp 24.502.933. Artinya setiap penerima bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Pucangombo berdasarkan nilai swadayanya berbeda-beda dikarenakan untuk kebutuhan proses pembangunan rumah antar penerima bantuan juga tidak sama.

Tabel 2. Nama Penerima Bantuan Reguler Desa Pucangombo beserta Sumber Swadaya

| No. | Nama Penerima Bantuan | Sumber Dana Bahan | | Pekerjaan | Jumlah Penghasilan (Rp) |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | Dana Tunai (Rp) | Pakai Bahan Lama (Rp) | | |
| 1 | Tumiran | 23.299.000 | | Petani | 950.000 |
| 2 | Dedi Yulianto | 24.788.500 | 195.000 | Petani | 700.000 |
| 3 | Sumardi | 25.462.500 | 195.000 | Petani | 500.000 |
| 4 | Anas Widiyanto | 26.443.500 | 195.000 | Karyawan | 650.000 |
| 5 | Sakiman | 27.502.336 | | Wiraswasta | 600.000 |
| 6 | Tuinem | 25.243.933 | 195.000 | Petani | 700.000 |
| 7 | Amat Kadimun | 24.190.836 | | Petani | 500.000 |
| 8 | Misni | 26.243.211 | 195.000 | Petani | 700.000 |
| 9 | Rusmin | 28.596.636 | 195.000 | Petani | 550.000 |
| 10 | Nanik Sulandari | 29.642.136 | 195.000 | Petani | 600.000 |

Grafik 3. Dana Tunai (Rp) Penerima Bantuan Reguler



Berlandaskan tabel dan grafik di atas, nama penerima bantuan Reguler bentuk swadaya tertinggi atas nama Ibu Nanik Sulandari senilai Rp 29.642.136 sedangkan bentuk swadaya terendah atas nama Bapak Tumiran senilai Rp 23.299.000. Artinya setiap penerima bantuan reguler di Desa Pucangombo berdasarkan nilai swadayanya berbeda – beda dikarenakan untuk kebutuhan proses pembangunan rumah antar penerima bantuan juga tidak sama. Selain itu, dapat

diketahui pula berdasarkan dua tabel di atas bahwa mayoritas dari penerima bantuan bekerja sebagai petani sedangkan lainnya bekerja sebagai karyawan dan wiraswasta.

Sumber dari keswadayaan bisa berasal dari keluarga inti, keluarga besar, dukungan kepala desa atau lurah, tetangga, teman atau sahabat, lingkungan. Sedangkan bentuk keswadayaan antara lain tabungan, hasil jual hewan ternak, tabungan bahan bangunan, hasil sawah atau kebun, tenaga, gotong royong, harta benda yang dimiliki (bisa berupa perhiasan), arisan bahan bangunan, pengetahuan, pinjam uang (utang bank / saudara / tetangga), kepedulian dan kesadaran. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan penerima bantuan dapat diketahui bahwa di desa pucangombo sumber swadaya berasal dari hasil jual ternak, hasil sawah atau kebun, pinjam uang, sistem gotong royong, rasa kepedulian dan kesadaran. Terkait gotong royong, rasa kepedulian dan kesadaran di kabupaten pacitan memang luar biasa contohnya pada saat ada penerima bantuan yang sama sekali tidak memiliki swadaya atau hidup sebatang kara antar tetangga saling membantu dengan cara memberikan makan kepada tukang, dalam proses pembangunan dibantu dengan sukarela gotong royong bahkan sampai lembur agar proses pembangunan rumah lekas tuntas.

KESIMPULAN

Berdasarkan data serta hasil pengamatan, observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat lebih tepatnya penerima bantuan desa pucangombo, peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam program BSPS melalui upaya keswadayaan demi mewujudkan rumah layak huni dapat dikatakan berhasil karena penerima bantuan antusias akan perwujudan rumah layak huni dapat dibuktikan dengan bentuk swadaya sumber tunai yang cukup besar nilainya mampu menunjang kelancaran pembangunan rumah yang layak huni. Kemudian, dampak bagi penerima bantuan yakni meningkatnya pola hidup sehat dan produktivitasnya atas hunian mereka. Bentuk keterkaitan antara rumah layak huni dengan kesejahteraan masyarakat terletak pada hunian memiliki fungsi secara luas baik secara fisik maupun mental. Secara fisik disini maksudnya rumah melindungi penghuninya dari bahaya internal maupun eksternal. Sedangkan, secara mental rumah tentunya akan memberikan rasa nyaman, aman, dan tidak merasa cemas ataupun was-was. Selain itu, program BSPS juga dapat dikategorikan program yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan rumah layak huni mengingat angka RTLH di negara kita masih tinggi.

SARAN

Bagi pihak kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harapan peneliti semoga program BSPS ini terus berjalan di masa mendatang bahkan bisa menyasar ke berbagai daerah pelosok sehingga angka rumah tidak layak huni

mengalami penurunan. Selain itu, kementerian ini bisa mengeluarkan program baru yang juga bermanfaat seperti program BSPS.

Bagi pihak penerima bantuan, harapan dari peneliti bisa memelihara dengan baik rumah tersebut dan tidak menjualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpendra, R., & Suriani, L. (2023). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *JURNAL KEMUNTING*, 4(1), 928-952. <https://doi.org/10.0506/jkg.v4i1.852>
- Azmalina, T. P., Ayuh, E. T., Mayasari, R. T., & Yuliani, H. (2023). Peran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu dalam Mensosialisasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 71-78. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6167>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hermawan, E., & Sulastri, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat. *Distingsi: Journal of Digital Society*, 1(3), 1-6. <https://jurnal.panengen.com/index.php/djods/>
- Indayani, B., & Sadriah, S. (2020). PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103-116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto baru (2020). *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i2.79>
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Priatama, B. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Seleksi terhadap Kompetensi dan Kinerja di Moderasi Pengawasan Pada Program BSPS Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2), 178-187. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2041>

Qomaria, A. (2015). Dampak sosial ekonomi dan lingkungan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-7.

Sjafari, A. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.12707>